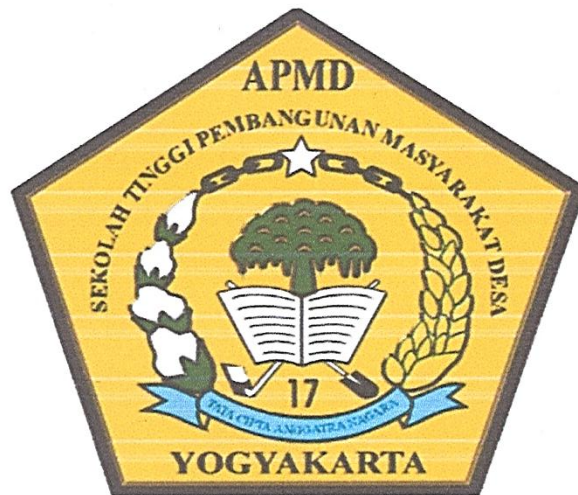


**GOVERNING PEMERINTAH KALURAHAN DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN NGLINDUR
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun oleh:

**HERYBERTUS YULIUS SERAN
22520141**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2024**

**GOVERNING PEMERINTAH KALURAHAN DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN
NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 November 2024

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Pembimbing dan Ketua Penguji	
2. <u>Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat</u> Penguji 1	
3. <u>Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Penguji 2	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herybertus Yulius Seran

NIM : 22520141

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Governing Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta*” ini benar-benar merupakan karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah dicantumkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini saya siap menanggung sanksi yang diajukan kepada saya apabila kemudian ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan karya saya.

Yogya  2024

Herybertus Yulius Seran

NIM. 22520141

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Herybertus Yulius Seran
NIM : 22520141
Telp : 62 812-3874-8030
Email : seranhery1@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“*Governing* Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Umkm Di Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta” beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 3 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Herybertus Yulius Seran

NIM: 22520141

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang telah melimpahkan Berkah dan Penyertaan-Nya. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Bapak Gabriel Lotu dan ibu Theresia Lai terimakasih yang sangat luar biasa untuk cinta, kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, kerja keras, dan segala yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Bapa, mama yang selalu mendukung baik secara moril maupun materi, arahan bimbingan, semangat, motivasi dalam segenap perjalanan hidup yang saya jalani hingga sampai saat ini dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Kepada adik saya Maria Cornelia Bano yang sudah mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P yang telah membimbing saya dengan menyumbangkan pikiran, waktu, pengetahuan dan yang selalu mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Untuk Pemerintah Kalurahan Nglindur yang telah menerima dan membantu saya dalam menyusun skripsi.
5. Kepada Almamaterku, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
6. Kepada Kaka Phiter dan Lory yang selalu membantu memberikan memberikan motivasi, semangat, dan mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudara saya yang sudah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yaitu: Andy, Yanto dan Yance.

MOTTO

**“Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan TUHAN
untuk selama-lamanya”**

(Mazmur 117:2)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat serta penyertaan-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“GOVERNING PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa agar memperoleh gelar sarjana satu (S1) dari kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa” APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Sehingga bantuan dan dukungan dari semua pihak sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan ucapan limpah terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria, yang telah melimpahkan rahmat berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,MP selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan arahan selama penulis belajar di STPMD “APMD”. Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD”APMD” Yogyakarta yang telah mendidik dan membagikan ilmunya kepada penulis. Terimakasih atas semua ilmu yang telah Bapak dan Ibu dosen berikan. Dan semoga penulis dapat mempergunakan ilmunya dengan baik.
6. Karyawan-karyawan yang ada di STPMD “APMD” yang telah melayani kami dengan sepenuh hati dalam segala bentuk kebutuhan kami.
7. Pemerintah Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang telah memberi kesempatan izin penelitian kepada penulis.

Yogyakarta, 03 Desember 2024

Herybertus Yulius Seran

NIM. 22520141

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
INTI SARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7

F. Literatur Review	7
G. Kerangka Konseptual	11
1. <i>Governing</i>	11
2. Pemetaan Potensi Kalurahan.....	12
3. Pengembangan UMKM	14
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Lokasi Penelitian.....	19
3. Unit Analisis	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
I. Teknik Analisis Data	23
c. Penarikan Kesimpulan	24
BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DIY	26
A. Sejarah Kalurahan Nglindur.....	26
B. Kondisi Geografis.....	29
C. Kondisi Demografis	31
1. Jumlah Penduduk	31
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	31
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian.....	33
Di Kalurahan Nglindur, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dengan jumlah laki-laki mencapai 800 orang dan perempuan sebanyak 200 orang. Sementara itu, dalam jabatan perangkat Kalurahan, terdapat 28 laki-laki dan hanya 4 perempuan, yang menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam peran sebagai pamong kalurahan.....	33
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34

D. Sosial Ekonomi	35
E. Sarana Dan Prasarana	36
F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	38
1. Visi	38
2. Misi	39
3. Lembaga Kemasyarakatan	40
4. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Menengah	43
BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN <i>GOVERNING</i> PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN NGLINDUR.....	46
A. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan dalam Memajukan UMKM.....	46
B. Komitmen Pemerintah Kalurahan dalam Memberikan Dukungan Terhadap Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur	52
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur.....	60
b. Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai	61
BAB IV	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Informan Atau Narasumber	20
Tabel 1. 2 Penduduk Kalurahan Nglindur Berdasarkan Usia	32
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian	33
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	34
Tabel 3. 1 Data Kelompok UMKM	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Nglindur	30
---	----

INTI SARI

Pemerintah memainkan peran yang sangat krusial dalam pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Kebijakan yang diimplementasikan diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi, komitmen dan factor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif dan objek yang diteliti adalah strategi dan komitmen Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur. Dengan subjek yang diteliti pada penelitian ini informan terdiri dari 8 orang yang dianggap relevan dengan objek yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Strategi Pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM adalah dengan membentuk tim kerja yang terstruktur dengan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM serta pembentukan kelompok UMKM berdasarkan kategori-kategori usaha yang ditentukan guna meningkatkan mutu produktivitas dan menambah wawasan dan ketrampilan masyarakat sebagai pelaku UMKM di Kalurahan Nglindur; 2) Komitmen Pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM adalah dengan memberikan perhatian yang khusus dalam hal pendanaan dan pelatihan dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM; 3) Faktor-faktor pendukung pengembangan UMKM antara lain: Peluang, Sumber Daya Alam (SDA), Bantuan Modal Pemerintah, Sosialisasi UMKM. dan Fakto-faktor yang menjadi kendala antara lain: a) Masyarakat masih kekurangan modal usaha; b) Masyarakat masih kekurangan ketrampilan; c) Masyarakat kekurangan peralatan; d) Terjadi konflik antar kelompok UMKM.

Kata Kunci: strategi pemerintah, pengembangan UMKM, komitmen pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, terutama dalam bidang kuliner, fashion, dan seni. Pengembangan UMKM tidak hanya berfokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang ada di komunitas lokal. Dalam konteks program pembangunan nasional, pengembangan UMKM menjadi elemen krusial untuk membangun fondasi pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan ekonomi suatu negara, baik yang berkembang maupun yang maju, adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi menjadi upaya untuk meningkatkan kekuatan dan kualitas hidup masyarakat. Diperlukan pekerjaan yang sesuai untuk setiap generasi guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan di seluruh negara, karena peningkatan dalam sektor ini mencerminkan kemakmuran, yang terlihat dari peningkatan pendapatan per kapita, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki penduduk dengan beragam potensi, baik di sektor kelautan, pertanian, dan

lainnya, yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Luasnya wilayah Indonesia tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan potensi yang ada di setiap daerah. Krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997 hingga 1998 mengakibatkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Dampak dari situasi ini dirasakan oleh banyak usaha di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan jasa, yang mengalami stagnasi bahkan terhenti. Meskipun demikian, setelah krisis, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor ekonomi besar. Sektor UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam peningkatan jumlah produksi yang berujung pada penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah memainkan peran yang sangat krusial dalam pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Kebijakan yang diimplementasikan diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai perbaikan ekonomi, langkah awal sebaiknya dimulai dari tingkat desa. Pengembangan ekonomi di desa bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Proses ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memaksimalkan potensi yang ada. Pemerintah desa memiliki otoritas untuk memanfaatkan sumber daya di desa demi kepentingan ekonomi masyarakat dan kemajuan pembangunan desa.

UMKM diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 undang-

undang tersebut menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang signifikan dalam pengembangan ekonomi daerah serta perekonomian nasional. Menurut Tambunan (2012), UMKM di Indonesia terbukti memainkan peran krusial dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, di mana banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sementara UMKM mampu bertahan dalam situasi krisis tersebut. Selain itu, sektor ini juga berkontribusi dalam peningkatan pendapatan per kapita atau Produk Domestik Bruto.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki beragam manfaat bagi masyarakat desa, dan peran mereka dalam pengembangan ekonomi pedesaan sangat penting. UMKM desa menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat. Hal ini mengurangi tingkat pengangguran di pedesaan dan membantu orang-orang mendapatkan mata pencaharian, dan juga UMKM memberikan kesempatan kepada penduduk desa untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, dan layanan pendidikan dan kesehatan. UMKM mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pelestarian budaya dan tradisi setempat. UMKM desa sering menggunakan sumber daya lokal, seperti bahan baku pertanian atau alam, dalam produksi mereka. Hal ini membantu mendorong penggunaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya lokal. UMKM dapat membantu dalam diversifikasi ekonomi pedesaan. Mereka memungkinkan

masyarakat desa untuk tidak hanya bergantung pada satu sektor ekonomi, seperti pertanian, tetapi juga terlibat dalam berbagai jenis bisnis. UMKM juga sering menjadi wadah bagi inovasi dan kreativitas. Masyarakat desa dapat menciptakan produk atau jasa baru yang unik dan menarik pasar. UMKM sering menjadi wadah bagi inovasi dan kreativitas. Masyarakat desa dapat menciptakan produk atau jasa baru yang unik dan menarik pasar.

Dalam mengembangkan potensi desa peran melalui program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat signifikan, sehingga keterlibatan pemerintah menjadi krusial. Pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga yang memberikan bimbingan kepada masyarakat. Pemerintah desa berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan panduan bagi masyarakat. Dengan keterbatasan pengetahuan masyarakat desa menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kelurahan Nglindur, Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi dalam pengembangan UMKM, dimana hal tersebut didukung dengan potensi sumber daya alam dan letak geografis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga proses pengembangan UMKM berkontribusi aktif untuk memajukan pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Nglindur sesungguhnya sangat beragam, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan.

Dalam mempertahankan eksistensi UMKM di Kelurahan Nglindur, Kabupaten Gunungkidul dalam menghadapi globalisasi teknologi dan persaingan pasar yang sangat ketat saat ini pemerintah melalui pemerintahan Desa yang

memiliki kewajiban untuk memecahkan masalah klasik UMKM yaitu terkait dengan modal, akses distribusi dan teknologi Kepala Desa dituntut untuk dapat memecahkan permasalahan yang dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Kelurahan Nglindur.

Studi ini berangkat dari masalah bahwa sistem perekonomian masyarakat di kalurahan Nglindur masih belum merata. Salah satu kendala yang ditemukan dalam pengembangan UMKM di kalurahan Nglindur adalah masih kurangnya dukungan kebijakan pemerintah dan kesulitan dalam melakukan transformasi digital. Pengembangan ekonomi desa melalui program UMKM dibutuhkan dukungan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, sosialisasi serta evaluasi kerja guna mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai topik ini yang ditulis dalam sebuah usulan penelitian yang berjudul **“*Governing* Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM Di Kalurahan Nglindur”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam studi ini, peneliti menentukan batasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti. Tujuan dari penetapan batasan ini adalah untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti akan memfokuskan perhatian pada dua aspek :

1. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan dalam memajukan UMKM
2. Komitmen Pemerintah Kalurahan dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur
3. Faktor pendukung dan Faktor penghambat dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Governing* pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perkembangan UMKM di Kalurahan Nglindur ?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur.
2. Untuk mengetahui komitmen Pemerintah Kalurahan dalam mendorong Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *Governng* Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti serta menjadi bahan evaluasi pemerintah Kalurahan Nglindur dalam usaha mengoptimalkan potensi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMKM di daerah tersebut.

F. Literatur Review

Tinjauan literatur merupakan suatu proses pencarian terhadap studi atau karya-karya sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilaksanakan, guna menghindari tindakan plagiasi. Secara umum, penelitian mengenai Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah hal yang baru.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Nandang et al., (*Jurnal Manajemen dan Bisnis Kreatif* Volume 8 No :1/2022). Yang berjudul “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan UMKM Desa Karya Mulya”. Hasil penelitian tentang Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam

mengembangkan UMKM desa Karya Mulya yaitu: 1. Kemampuan Kepala desa dalam membuat keputusan sangat baik, 2. Kemampuan memotivasi yang dimiliki oleh kepala desa baik, 3. Kemampuan komunikasi kepala desa sangat baik, 4. Kemampuan kepala desa dalam mengendalikan bawahan sangat baik, 5. Kepala desa dalam mengemban tugas sangat bertanggungjawab atau sangat baik, 6. Kemampuan kepala desa dalam mengendalikan emosi baik.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Monica Dwipi Salam dan Ananta Prathama (*Jurnal Kebijakan Publik*, Volume.13, No.2, 2022). Yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya telah menjalankan fungsinya dengan efektif dalam pengembangan UMKM di Kampung Kue. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengukuran indikator stabilisator, inovator, modernisator, dan pelopor yang telah berkontribusi dalam pengembangan UMKM di kawasan tersebut. Peran yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya merupakan upaya strategis untuk memajukan UMKM di Kampung Kue melalui berbagai kegiatan, sehingga UMKM di daerah tersebut dapat tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo (*Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 12, Nomor 1, Juni 2011). Yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pengembangan UMKM tidak hanya oleh UMKM saja, tetapi juga harus didukung semua stakeholder. Dukungan diharapkan datang dari asosiasi bisnis, perguruan

tinggi, dan instansi terkait di kabupaten/kota di DIY. Kebijakan pemerintah juga diperlukan untuk mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM di DIY merupakan percepatan transformasi UMKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin Achmad et al., (*Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 10, No. 1 (2020): 102). Yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pemasaran Produk UMKM Di Kelurahan Sidokumpul Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menjelaskan mengenai pemanfaatan media sosial memberikan prospek yang baik untuk menaikkan angka penjualan produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Hal itu disebabkan karena sistem pemasaran digital menyediakan platform jual beli secara daring, agar memudahkan proses pemesanan dan pembelian. Sehingga pembeli dapat berinteraksi dengan pemilik UMKM untuk melakukan transaksi secara langsung.

Kelima, Penelitian dilakukan oleh Nirwana et al., (*Jurnal Administrasi Publik* Volume 3, No. 1 (2017): 8.) Yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Enrekang, sudah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha kecil menengah, sudah ada beberapa masyarakat yang sudah

mampu mengembangkan usahanya, tapi pemerintah kabupaten Enrekang masih perlu untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Atsna Himmatul Aliyah (*Jurnal Ilmu Ekonomi* Volume 3 No 1 Mei 2022). Yang berjudul “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari aspek ekonomi yang menyatakan bahwa keberadaan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin baik pertumbuhan serta pembangunan ekonomi negara.

Secara umum, keenam penelitian yang telah diuraikan memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut terletak pada fokus penelitian, di mana baik peneliti sebelumnya maupun peneliti saat ini berupaya untuk mengungkapkan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepemimpinan lurah. Dalam konteks pengembangan UMKM pada beberapa penelitian diatas senada berasumsi bahwa pengembangan UMKM tidak hanya dapat dilakukan oleh UMKM semata melainkan juga dipengaruhi oleh keterlibatan semua stakeholder. Sehingga menjadi sangat penting peranan pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM diwilayah kalurahan tersebut. Baik itu berupa regulasi pemerintah maupun bentuk pendekatan yang digunakan penting untuk diperhatikan kembali dengan mengingat bahwa perihal tersebut di atas sangat erat berhubungan dengan pengembangan UMKM di kalurahan dalam upaya pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat untuk pencapaian sasaran

pembangunan ekonomi di wilayah desa bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendistribusikan pendapatan secara merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

G. Kerangka Konseptual

1. *Governing*

Governing adalah istilah yang berarti mengacu pada proses atau perbuatan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan, mengatur, menyelenggarakan dan tata kelola dalam berbagai aspek pemerintahan, organisasi atau lingkungan tertentu.

Stephen A. Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul *Ruling But Not Governing* menjelaskan perbedaan antara konsep pemerintahan (*governing*) dan penguasaan (*ruling*). Dalam analisisnya, ia menjelaskan bahwa kekuatan militer di Mesir sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun tidak menjalankan fungsi pemerintahan (*governing*) dalam arti mengatur dan mengelola. Dengan demikian, dominasi militer hanya terbatas pada penguasaan (*ruling*), yang berarti bahwa *ruling* tidak sama dengan menjadi pemerintah.

Ruling dan *governing* memiliki arti yang saling terkait dengan dominasi, di mana elemen penguasaan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk militer dan organisasi non-pemerintah. Di sisi lain, pengelolaan sangat terkait dengan otoritas atau pemerintah yang memiliki hak dan kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan. Dalam hal ini, memerintah

berarti memanfaatkan otoritas politik yang dimiliki oleh pemerintah, atau dengan kata lain, melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan.

Konsep pemerintahan memiliki akar dari tradisi Belanda yang menekankan pentingnya pengaturan dan manajemen. Pengaturan dan pengelolaan ini meliputi tindakan hukum dan administrasi, dengan fokus yang minim pada aspek politik. Pengaturan berhubungan dengan proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembuatan hukum, sementara pengelolaan mencakup fungsi-fungsi seperti pengarahan, penataan, dan penguasaan.

Fokus utama dari *governing* sebagai dasar konsep identitas mencakup proses politik, hukum, dan administrasi. Politik berfungsi sebagai kegiatan pembuatan keputusan dan hukum, sedangkan administrasi merupakan bentuk teknis pelaksanaan dari keputusan atau hukum tersebut. *Governing* dan kebijakan merupakan dua hal yang saling terkait; ketika membahas *governing*, tidak dapat dipisahkan dari kebijakan, karena kebijakan muncul dari proses *governing* itu sendiri. Kebijakan diartikan sebagai tindakan utama pemerintah, di mana fungsi pemerintah adalah melindungi, bukan hanya sekadar menguasai.

2. Pemetaan Potensi Kalurahan

Potensi yang terdapat dalam tulisan ini mencakup energi, kekuatan, kapabilitas, dan kesiapan yang memiliki kesempatan untuk ditingkatkan. Potensi

desa mencakup semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa (Ahmad Soleh, 2017). Sumber daya tersebut dipandang sebagai modal dasar yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi desa menurut Ahmad Soleh (2017) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Potensi Fisik

Potensi fisik merujuk pada sumber daya alam yang tersedia di desa tersebut. Sumber daya yang termasuk dalam kategori potensi fisik meliputi:

- a) Tanah, yang merupakan elemen penting bagi kehidupan masyarakat desa.
- b) Air, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c) Manusia, yang dalam hal ini merujuk pada tenaga kerja.
- d) Cuaca serta iklim, yang memiliki peran signifikan bagi masyarakat desa.
- e) Ternak, yang berfungsi sebagai sumber tenaga hewan.

2. Potensi Nonfisik

Potensi non fisik yang terdapat di desa mencakup berbagai sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di wilayah tersebut. desa yang bersangkutan. Menurut Ahmad Soleh (2017), sumber daya yang termasuk dalam kategori potensi nonfisik adalah:

- a) Masyarakat desa yang hidup secara bergotong royong menjadi kekuatan produksi, serta pembangun desa.
- b) Aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintah desa.
- c) Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif.

3. Pengembangan UMKM

UMKM adalah salah satu unit usaha yang produktif yang berdiri sendiri, dimiliki oleh individu atau badan usaha yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi. yang dikelola oleh individu, kelompok, maupun rumah tangga dengan kekayaan dan pendapatan tertentu. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimulai dari pendapatan, dengan adanya UMKM pastinya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga pendapatan masyarakat juga semakin tinggi.

Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 khususnya pada Bab 1 pasal 1. UMKM merujuk pada usaha perdagangan

yang dikelola oleh perorangan dan mengaju pada kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Olehkarena itu untuk menentukan jenis usaha yang dijalankan, perlu memperhatikan kriteria tersebut. Karena hal ini memiliki dampak signifikan pada proses perizina usaha dan penetapan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 mengenai UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), definisi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, serta memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha

Kecil atau Usaha Besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha-usaha kecil melalui penyediaan fasilitas, bimbingan, pendampingan, serta bantuan penguatan guna meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Pertumbuhan jumlah UMKM telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana sektor ini berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dengan rata-rata mencapai 96,66% dari total tenaga kerja nasional. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah, yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah, perhatian khusus diberikan pada pengembangan daerah pedesaan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan pengetahuan penduduk, ketergantungan pada usaha kecil di sektor tradisional, serta infrastruktur dan akses pemerintahan yang minim menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, kelompok wirausahawan desa (*Entrepreneurs Village*) melalui pengembangan UMKM diharapkan dapat menjadi solusi bagi sistem perekonomian yang lebih efektif, sehingga masyarakat dapat bersaing di pasar global. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan wirausahawan desa, yang pada gilirannya

mendorong kebijakan untuk perbaikan infrastruktur, teknologi, permodalan, dan kelembagaan UMKM. Diharapkan, gagasan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah, peneliti, dan akademisi dalam merencanakan program-program baru yang memberikan kontribusi signifikan bagi negara. Dengan demikian, UMKM memiliki peranan yang krusial dalam perekonomian lokal dan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi ke tingkat internasional.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara mendalam mengenai strategi pengembangan UMKM di seluruh lapisan masyarakat pedesaan.
2. Menguraikan pentingnya eksplorasi potensi pendapatan asli daerah melalui rencana pembangunan desa yang dilaksanakan serta dampak yang mungkin timbul dari kegiatan tersebut.
3. Menerapkan pendekatan umpan balik untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi antara para pemangku kepentingan yang relevan dalam menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan kewirausahaan.
4. Membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya menjadi wirausahawan desa (Entrepreneurs Village) sebagai persiapan untuk menghadapi persaingan di pasar global.

5. Menyelenggarakan pelatihan bagi calon Entrepreneurs Village yang tangguh, mandiri, dan kompetitif di pasar global oleh tim yang berkompeten.
6. Melaksanakan program UMKM pedesaan untuk mendukung wirausahawan desa agar mampu bersaing di tingkat global.

Berdasarkan definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu ataupun badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat dengan harapan dapat membantu dan meningkatkan perekonomian dikalangan msyarakat pedesaan.

Pengembangan UMKM merupakan solusi bagi sistem perekonomian pada suatu daerah. Sehingga Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat untuk memberdayakan usaha-usaha kecil melalui pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan sumberdaya yang dimiliki dalam mendorong percepatan pengembangan UMKM pada suatu daerah dan meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam studi ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Moleong (2017:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek

penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang alami dengan memanfaatkan berbagai metode yang bersifat natural. Menurut Hendryadi et al. (2019:218), penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan naturalistik yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial secara alami.

Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kualitas daripada kuantitas, dan data yang dikumpulkan tidak berasal dari kuesioner, melainkan dari wawancara, observasi langsung, serta dokumen resmi yang relevan. Selain itu, penelitian kualitatif lebih memprioritaskan aspek proses dibandingkan dengan hasil akhir, karena hubungan antar bagian yang diteliti akan lebih jelas jika diamati dalam konteks proses.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksplorasi ialah penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan serta memperoleh pengalaman baru berasal dari situasi yang baru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit Analisis

Menurut Morissan (2017:166) unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai

keseluruhan unit yang dianalisis. Unit analisis juga bisa berupa individu, benda, peristiwa seperti aktivitas individu atau sekelompok orang sebagai subjek penelitian.

a. Objek Penelitian

Menurut Menurut Sugiyono (2019) objek penelitian adalah objek atau kegiatan yang telah ditentukan peneliti untuk dipelajari lebih lanjut dan dapat ditarik kesimpulan. Objek penelitian dalam studi ini adalah strategi dan komitmen Pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur.

b. Informan

Untuk mengetahui Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur, maka disini peneliti memilih beberapa informan, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Informan Atau Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Tingkat Pendidikan	Status/Jabatan
1	Muhammad Hanan Amsori, S.IP	Laki-laki	52th	S1	Lurah Nglindur
2	Rina Nur Hasanah, S.Pd	Perempuan	35th	S1	Carik
3	Proto	Laki-laki	57th	SMP	Angota BPD
4	Totok	Laki-laki	31th	SMA	Danarto
5	Aribowo	Laki-laki	38th	SLTA	Bendahara UMKM
6	Muhammad Husni Al'huda	Laki-laki	52th	SLTA	Kamituwo
7	Rena Tri Nur Widyastuti	Perempuan	36th	SMK	Anggota UMKM
8	Lastri	Perempuan	46th	SMA	Anggota UMKM

Sumber : Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kalurahan Nglindur Tahun 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk saling melengkapi agar data yang diperoleh benar-benar valid. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Observasi (Pengamatan)

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh). Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga yang melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung (observasi) pada kegiatan pelaksanaan program UMKM di Kalurahan Nglindur untuk menyajikan gambaran realistik tentang perkembangan UMKM di Kalurahan Nglindur untuk menjawab pertanyaan bagaimana strategi dan komitmen pemerintahan kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh penulis terhadap kegiatan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur, masih dijumpai pada kegiatan UMKM di Wilayah Kalurahan Nglindur, dimana masih ditemukan masyarakat UMKM yang bekerja dengan menggunakan peralatan seadanya dan tidak efisien dalam melakukan kegiatan UMKM. Selain itu masih terlihat minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan media digitalisasi dalam menunjang pengembangan UMKM di Wilayah Kalurahan Nglindur.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam Sugiyono (2016:194).

Dimana dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh penulis bersama informan sebanyak 8 orang yang dianggap relevan dengan objek yang diteliti pada penelitian ini. Sehingga dapat mempermudah penulis dalam melakukan penyelidikan naturalistik yang bertujuan untuk

memperoleh pemahaman mendalam mengenai kegiatan pengembangan UMKM di Wilayah Kalurahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, Menurut Sugiyono (2018:476).

Kegiatan pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mencari dan mempelajari informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui arsip dan dokumen yang dipublikasikan oleh Pemerintah Kalurahan Nglindur di media online.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Model analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Proses analisis mencakup tiga langkah yang berlangsung secara simultan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992:16). Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, tiga komponen dalam model analisis interaktif dari Miles dan Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Teknik ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa data dapat dimanfaatkan dengan cara yang paling efektif dan efisien, sehingga hanya data yang relevan dan dianggap sah yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitian. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian.

Dalam proses reduksi data, peneliti akan mengumpulkan informasi dan menyusunnya sesuai kebutuhan, dengan memperhatikan pelaksanaan serta permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Hal tersebut dikumpulkan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk selanjutnya dijadikan rangkuman.

b. Data Display (Penyajian Data)

Langkah berikutnya adalah Menampilkan Data. Penyajian Data adalah hasil dari proses reduksi yang disusun dalam laporan secara sistematis, sehingga mudah dibaca dan dipahami, baik dalam konteks keseluruhan maupun dalam bagian-bagiannya sebagai satu kesatuan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut Sugiyono (2021:142) Kesimpulan merupakan usaha untuk mencari atau mengetahui makna,

keteraturan, penjelasan, pola-pola, alur sebab akibat maupun proporsisi. Sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KALURAHAN NGLINDUR KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DIY

A. Sejarah Kalurahan Nglindur

Kalurahan Nglindur adalah salah satu kalurahan yang berada di wilayah Kapanewon Girisubo. Menurut catatan sejarah pemerintahan, Kalurahan Nglindur mulai dibentuk sebagai entitas pemerintahan pada tahun 1929. Suksesi kepemimpinan di Kalurahan Nglindur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelum tahun 1925 Masehi, pemerintahan setingkat Kapanewon belum ada, dan wilayah tersebut masih dikelola sebagai Kademangan yang dipimpin oleh seorang Demang. Demang memiliki tanggung jawab terhadap Bekel, sementara di bawah Bekel terdapat sub pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Congkok. Oleh karena itu, struktur pemerintahan pada masa itu masih sangat sederhana. Masyarakat Nglindur telah terbentuk di bawah kepemimpinan seorang Bekel, meskipun sistem pemerintahan formal belum diterapkan.
2. Pada tahun 1926 M, Kemantren didirikan dan dipimpin oleh Mantri Pangreh Prodjo yang berkedudukan di Jerukwudel. Kemantren ini setara dengan Kapanewon yang ada saat ini, dan pada waktu itu dijabat oleh Rng. Hardjowidarso.

3. Pada tahun 1929, Kemantren di Jerukwudel mengalami perubahan menjadi Order Distrik yang berada di bawah Kawedanan pada masa penjajahan Belanda. Pejabat Order Distrik Rongkop berkedudukan di Jerukwudel, dengan kantor yang terletak di samping pasar Rancah. Pimpinan order distrik ini dikenal sebagai Asisten Wedono. Asisten Wedono pertama yang memimpin wilayah Order Distrik Rongkop di Jerukwudel adalah Rng. Harjodikoro. Sebelum ibukota Order Distrik berpindah ke Baran, Asisten Wedono yang memimpin dengan ibukota di Jerukwudel secara berurutan adalah: Rng. Hardjodipoerwo, Rng. Hardjo Pandriyo, dan Rng. Hardjo Sumantri, hingga sekitar tahun 1940-an, ketika ibukota berpindah ke Semugih.
4. Seiring dengan pembentukan Order Distrik sebagai pengganti Kemantren, di Nglindur juga didirikan pemerintahan di bawah Kemantren yang dinamakan Kalurahan Nglindur. Kalurahan ini dipimpin oleh seorang Lurah Kalurahan yang dibantu oleh Pamong Kalurahan, yang terdiri dari Carik, Kamituwo, Bayan, Jogomirudo, Jogoboyo, Moden, serta para Antek (Antek di sini merujuk pada pembantu Pamong Kalurahan yang berada di luar struktur pemerintahan).
5. Dari urutan sejarah pembentukan pemerintahan di Nglindur, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Nglindur telah memulai pemerintahan Kalurahan sejak tahun 1915. Sebelum tahun 1915, masyarakat setempat dipimpin oleh seorang Bekel. Berikut adalah daftar kepemimpinan di Kalurahan Nglindur secara berurutan:

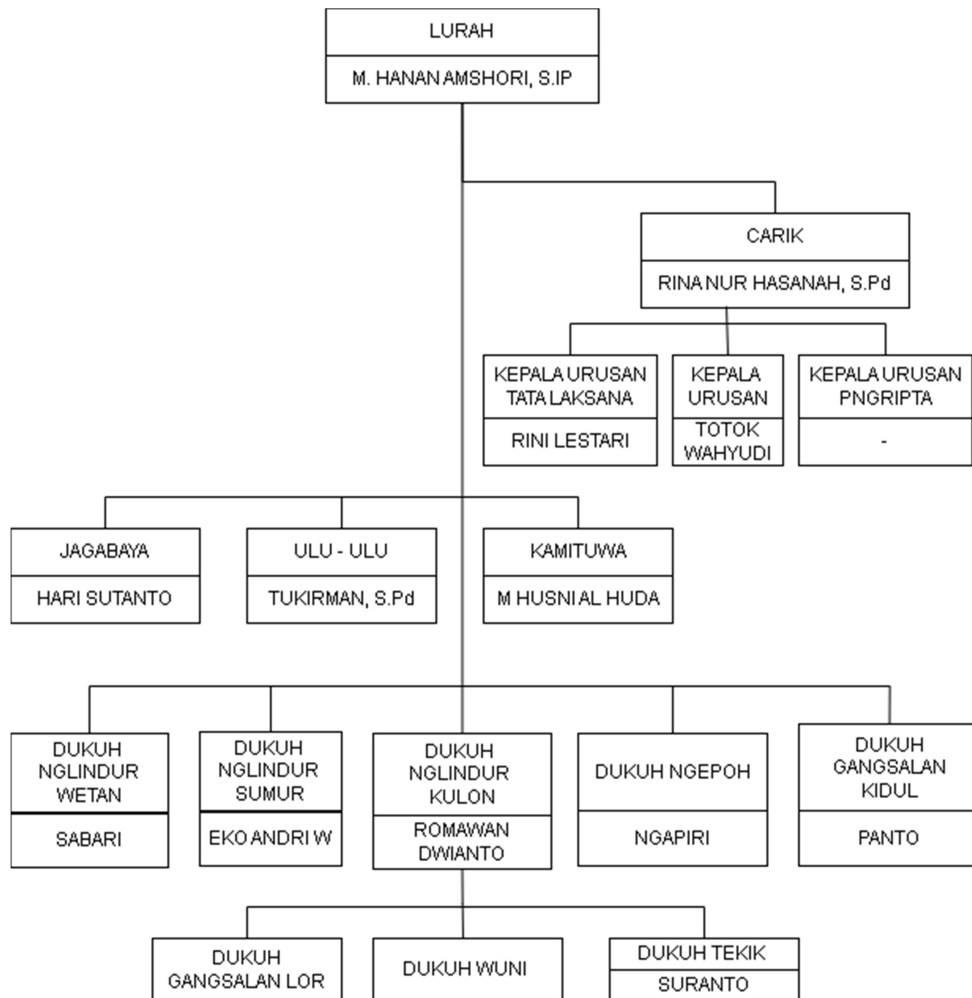
- a. Hingga tahun 1915, kepemimpinan dipegang oleh Bekel. Identitas Bekel yang memimpin pada waktu itu serta periode awal kepemimpinan komunitas masyarakat Nglindur belum dapat dipastikan dengan jelas.
- b. Antara tahun 1915 hingga 1926, jabatan tersebut diisi oleh Lurah Kalurahan Kerto Semito.
- c. Dari tahun 1927 hingga 1946, kepemimpinan beralih kepada Lurah Kromo Wijoyo.
- d. Pada periode 1946 hingga 1956, Lurah HS Suparno mengambil alih kepemimpinan.
- e. Lurah Parto Wijoyo memimpin dari tahun 1956 hingga 1965.
- f. Antara tahun 1966 dan 1985, Lurah K Karso Pawiro menjabat sebagai pemimpin.
- g. Dari tahun 2004 hingga 2014, Lurah Sujana memimpin komunitas tersebut.
- h. Pada periode 2014 hingga Juni 2015, kepemimpinan dipegang oleh Penjabat Lurah Suprpta.
- i. Dari Juni 2015 hingga Desember 2015, pejabat Lurah Suharyanto memimpin.
- j. Lurah Supriyana menjabat dari tahun 2016 hingga 2022.

B. Kondisi Geografis

Kalurahan Nglindur adalah salah satu dari 144 Kalurahan yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini terletak di Kapanewon Girisubo, tepatnya di sebelah tenggara pusat Kabupaten Gunungkidul, dengan jarak sekitar 32 km dari ibukota kabupaten. Luas wilayah Kalurahan Nglindur mencapai 617,5630 hektar. Secara administratif, batas wilayah Kalurahan Nglindur adalah sebagai berikut:

1. Di sebelah barat berbatasan dengan Bohol Rongkop, Gunungkidul.
2. Di sebelah selatan berbatasan dengan Tileng, Girisubo, Gunungkidul.
3. Di sebelah timur berbatasan dengan Melikan, Rongkop, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
4. Di sebelah utara berbatasan dengan Semugih, Rongkop, Kapanewon Gunungkidul. Mengenai orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan), data monografi Kalurahan Nglindur menunjukkan informasi sebagai berikut:
 - a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 6,5 Km.
 - b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota/IbuKota Kabupaten adalah 40 Km.
 - c. Jarak dari Ibukota Provinsi 80 Km. Berikut ini adalah peta wilayah Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Nglindur



Sumber: Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2023

Dari gambar 1. di atas menggambarkan tentang struktur organisasi Kalurahan Nglindur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.2 Tahun 2020 tentang Pemerintah Kalurahan. Kalurahan adalah desa diwilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 30 memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintah. Keterangan: - Lurah (Kepala Desa) - Carik (Sekretaris Desa) - Danarta (Kaur Keuangan) - Tata Laksana (TU) - Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan) - Jagabaya (Kasie Pemerintahan) - Ulu-ulu (Kasie Kesejahteraan) - Kamituwa (Kasie Pelayanan)

C. Kondisi Demografis

1. Jumlah Penduduk

Menurut data yang tersedia mengenai jumlah penduduk di Kalurahan Nglindur, tercatat bahwa jumlah penduduk laki-laki mencapai 2.181 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 2.187 orang. Dengan demikian, total populasi di Nglindur adalah 4.368 orang. Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kalurahan Nglindur sedikit lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan. Selain itu, jumlah Kepala Keluarga di wilayah ini tercatat sebanyak 784 orang, dengan kepadatan penduduk sebesar 4 jiwa/km². Berikut adalah rincian tabel yang menunjukkan jumlah penduduk.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk Kalurahan Nglindur menunjukkan bahwa kelompok usia terbanyak adalah antara 26 hingga 40 tahun, dengan total 943 individu. Sebaliknya, kelompok usia di atas 75 tahun merupakan yang paling sedikit, dengan hanya 47 orang. Kalurahan Nglindur memiliki populasi dewasa yang signifikan, terutama di kalangan perempuan yang berjumlah 490 orang, sementara laki-laki mencapai 453 orang. Untuk kelompok usia di atas 75

tahun, laki-laki mendominasi dengan jumlah 26 orang, sedangkan perempuan berjumlah 21 orang. Berikut adalah rincian tabel berdasarkan kategori usia:

Tabel 1. 2 Penduduk Kalurahan Nglindur Berdasarkan Usia

Kelompok Umur Tahun	Laki Laki (Jiwa)	Persentas e (%)	Perempuan (Jiwa)	Persentas e (%)	Jumlah (Jiwa)
0 - 6	125	5,73	119	5,44	244
7 - 12	108	4,95	144	6,58	252
13 - 18	178	8,16	189	8,64	367
19 - 25	181	20,70	211	,9,65	392
26 - 40	453	8,58	490	22,41	943
41 - 55	479	21,96	451	20,62	930
56 - 65	312	14,30	276	12,62	588
65 - 75	319	14,62	286	13,08	605
>75	26	1,19	21	0,96	47
Jumlah	2.181	100.00	2.187	100.00	4.368

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2023

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa kelompok usia 26-40 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi berdasarkan kategori usia. Sebaliknya, kelompok usia di atas 75 tahun mencatatkan jumlah penduduk terendah. Selain itu, mayoritas anggota dari 32 kelompok pengolah keripik singkong di Kalurahan Nglindur berasal dari kelompok usia 26-40 tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka termasuk dalam kategori usia produktif dan masih memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan keripik singkong.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian

Di Kalurahan Nglindur, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dengan jumlah laki-laki mencapai 800 orang dan perempuan sebanyak 200 orang. Sementara itu, dalam jabatan perangkat Kalurahan, terdapat 28 laki-laki dan hanya 4 perempuan, yang menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan dalam peran sebagai pamong kalurahan.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencarian

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Petani/Perkebunan	622	756	1378
Beleum/Tidak Kerja	230	212	442
Ibu Rumah Tangga	0	181	181
Perangkat Desa	28	4	32
Buruh Harian Lepas	480	230	710
Pegawai Negeri Sipil/PNS	13	13	25
Wiraswasta	129	53	182
Jumlah	1.502	1.449	2.949

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2023

Data di atas mengindikasikan bahwa sektor pertanian merupakan mata pencarian utama masyarakat Nglindur. Hal ini sejalan dengan karakteristik geografis Kalurahan Nglindur yang didominasi oleh lahan kering. Kondisi tersebut menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang sangat krusial dalam perekonomian masyarakat setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Nglindur perlu melindungi dan memfasilitasi para petani dalam upaya

meningkatkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan membantu petani menemukan pasar yang jelas untuk memasarkan komoditas dan produk mereka.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang paling banyak terlihat adalah lulusan SMA/ sederajat dengan total 573 orang, yang terdiri dari 256 laki-laki dan 317 perempuan. Sementara itu, jumlah lulusan Sarjana (S-1) paling sedikit, yaitu 33 orang, yang terdiri dari 10 orang, dengan rincian 5 laki-laki dan 5 perempuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan pendidikan wajib mereka.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Jenis Sekolah	Laki-laki (orang)	Persentase (%)	Perempuan (orang)	Persentase (%) ²	Jumlah (orang)
1	SD	252	21,22	211	18,91	463
2	SMP	394	33,17	381	34,14	775
3	SMA	537	45,2	519	46,5	1,056
4	Perguruan Tinggi	5	0,42	5	0,45	10
	Jumlah	1.188	100	1.116	100	2.304

Sumber: Profil Kalurahan Nglindur Tahun 2023

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak adalah pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 1.056 orang. Rendahnya jumlah penduduk Kalurahan Nglindur yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 mengakibatkan hanya terdapat 10 orang yang berpendidikan S1. Sementara itu, untuk pendidikan S2, belum ada individu yang

mencapai jenjang tersebut. Dengan demikian, mayoritas masyarakat di Kalurahan Nglindur memiliki latar belakang pendidikan SMA, yang tentunya berdampak pada jenis pekerjaan mereka. Sebagian besar dari mereka yang terlibat dalam pengolahan keripik singkong dan jahe instan adalah individu dengan pendidikan SMA. Hal ini berpengaruh pada pengalaman, wawasan, pengetahuan, serta mentalitas mereka, terutama bagi kelompok pengolah keripik singkong yang masih menghadapi tantangan dalam pemasaran, pengemasan, dan pengolahan jahe instan.

D. Sosial Ekonomi

Gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi Kalurahan Nglindur mencakup berbagai kelembagaan serta sejumlah usaha ekonomi yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Milik Kalurahan (UMKM) terdiri dari 1 unit, dengan total kegiatan sebanyak 5 dan memiliki pengurus inti yang berjumlah 6 orang. 2. Jasa Lembaga Keuangan meliputi Industri Kecil dan Menengah, khususnya industri makanan yang terdiri dari 7 unit, dengan total anggota pengurus sebanyak 35 orang. 3. Usaha Jasa dan Perdagangan mencakup 6 unit toko/kios yang menjual berbagai produk (umum, sayur, barang dan jasa tambang, dan lain-lain) serta menyerap 9 tenaga kerja. Selain itu, terdapat 75 unit toko kelontong yang mempekerjakan 17 orang. 4. Usaha Jasa yang berkaitan dengan gas, listrik, BBM, dan air meliputi 1 unit penyewaan tenaga listrik dan 57 unit pengeceran gas serta bahan bakar, yang secara keseluruhan menyerap 60 tenaga kerja. 5. Usaha Jasa Keterampilan terdiri dari 115 unit tukang kayu, 134 unit tukang batu, 16 unit tukang jahit/bordir, 1 unit

tukang cukur, 5 unit tukang service elektronik, dan 16 unit tukang pijat/pengobatan, yang secara keseluruhan menyerap 287 tenaga kerja.

E. Sarana Dan Prasarana

Secara umum Kalurahan Nglindur telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti yang dapat kami jelaskan di bawah ini:

1. Prasarana transportasi Darat yakni 1.5 panjang jalan konblok/semen/beton yang sejauh ini sudah cukup baik sepanjang 13.200 Km serta sarana transportasi darat 1 unit. Selain itu adanya transportasi sungai dengan kondisi cukup baik .
2. Prasarana komunikasi yang terdiri atas telepon 37.654 pelanggan GSM, tersedianya TV Umum 13, jumlah radio 782 dan Parabola 563 unit.
3. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di beberapa padukuhan yang terdiri dari sumur galian 9 unit dan PAH 1267 unit. Sanitasi sumur resapan air rumah tangga sebanyak 4.301 rumah dan hampir semua memiliki jamban pembuangan yang layak.
4. Meskipun daerah yang mayoritas kegiatan masyarakat petani namun, hingga saat ini belum memiliki irigasi pengairan.
5. Sarana dan prasarana pemerintahan seperti kantor kalurahan seta balai kalurahan.
6. Adanya sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan seperti kantor dan peralatannya, serta inventaris lainnya. Dalam hal ini lembaga-lembaga

tersebut ialah Karang Taruna, RT, RW, Lembaga Adat, Forum Kader 36 Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, dan lembaga lainnya, meski demikian belum semua memadai.

7. Sarana dan prasarana kesehatan dengan adanya balai pengobatan, posyandu, praktek bidan maupun dokter dan rumah bersalin.
8. Terdapat sarana energi dan penerangan listrik PLN di setiap rumah berjumlah 1.223 lokasi.
9. Sarana dan prasarana rumah produksi khusus dari pemerintah desa untuk pembuatan abon ikan tuna bagi kelompok pengolah abon itu belum ada dan hingga saat ini kelompok pengolah abon ikan tuna masih menggunakan rumah ketua kelompok untuk pembuatan abon ikan tuna.
10. Sarana dan prasarana untuk tempat pemasaran produk khusus abon ikan tuna sudah disediakan oleh Pemerintah Desa dengan jumlah 1 kios namun apabila ingin menggunakan kios tersebut maka kelompok pengolah abon ikan tuna harus menyewa tempat tersebut agar dapat digunakan.
11. Sarana dan prasarana untuk alat angkut ikan dalam jumlah besar seperti truk dan box penyimpanan ikan segar, nelayan dan kelompok pengolah abon ikan tuna sudah memiliki dan apabila ingin membeli ikan tuna dalam keadaan mendadak maka dapat dengan mudah didapatkan hal ini dikarenakan di setiap padukuhan pasti ada nelayan-nelayan yang menjual ikan di rumahnya baik dalam jumlah banyak ataupun sedikit.

F. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Visi merupakan pernyataan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah selama enam tahun di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk periode 2021-2027 adalah penjabaran dari Visi Lurah Nglindur yang terpilih, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis di Kalurahan Nglindur, sesuai dengan kondisi lingkungan dan sumber daya yang tersedia, serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, tantangan, dan peluang yang ada, kondisi yang ingin dicapai pada periode 2021-2027 adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, sehingga masyarakat Kalurahan Nglindur dapat hidup dalam keadaan yang bertakwa, berbudaya, bermartabat, dan sejahtera.

Visi di atas menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai oleh Pemerintah Kalurahan Nglindur pada tahun 2021-2027, yaitu: Terwujudnya pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap saran dan masukan, jujur dalam setiap tindakan dan adil bagi semua golongan masyarakat. Selalu mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menghadapi setiap persoalan, melakukan pelayanan publik yang cepat prosesnya, mudah syarat-syaratnya tepat sasaran. Selalu meningkatkan

profesionalisme bagi seluruh pamong dan perangkat di Kalurahan Nglindur dengan menjadikan spiritual roh dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat Kalurahan Nglindur. Pengembangan sistem usaha mandiri melalui pemberdayaan UMKM di Kalurahan Nglindur. Serta dengan menggalang silaturahmi antar dan inter golongan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalurahan. Visi Kalurahan Nglindur diselaraskan dengan visi Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu: Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”.Interkoneksi visi Kalurahan Nglindur seperti pada bagan sebagai berikut: KeterkaitanVisi Kabupaten dan Visi Kalurahan Nglindur. Visi Kalurahan Nglindur Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan guna mewujudkan masyarakat Kalurahan Nglindur yang bertakwa, berbudaya, bermartabat dan sejahtera. Selaras dengan visi dan arah pembangunan lima tahun Keempat RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi Kalurahan Nglindur.

Upaya tersebut sebagai berikut:

Misi 1:	Mengoptimalkan Pemerintah yang Bersih dan Transparan.
Tujuan:	Terwujudnya reformasi tata kelola Pemerintahan Kalurahan.
Sasaran :	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat, masyarakat, Pemerintah Kalurahan, lembaga Pemerintah Kalurahan dan Lembaga kemasyarakatan Kalurahan.
Misi 2:	Meningkatkan Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama.
Tujuan:	Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.
Sasaran :	Seluruh warga dan kalurahan.
Misi 3:	Menggali potensi SDM yang berbudaya
Tujuan:	Mengembangkan kualitas individu dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
Sasaran :	Tidak ada lagi Anak putus sekolah, tumbuhnya kelompok ketrampilan baru, Tersedianya TTG pertanian, peternakan
Misi 4:	Meningkatkan Kebutuhan Dasar Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Ekonomi, Pertanian Dan Kesehatan
Tujuan:	
Sasaran :	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Pendidikan Ekonomi Pertanian Kesehatan Beserta Sarana Prasarananya
	Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, Partisipasi Sosial.

3. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan yang ada dan berfungsi sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tugas lembaga kemasyarakatan adalah mendukung pemerintah kalurahan serta berperan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat di kalurahan tersebut. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah kalurahan bersifat kemitraan,

konsultatif, dan koordinatif. Di Kalurahan⁵² Nglindur, terdapat berbagai lembaga masyarakat, antara lain: LPMK, BPKal, PKK, Posyandu, Linmas, RT, RW, Karang Taruna, Kelompok Tani, Organisasi Keagamaan, dan UMKM..

Lembaga masyarakat ini memiliki tugas yaitu

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Setiap lembaga sosial yang terdapat di Kalurahan Nglindur dibentuk sesuai dengan fungsi masing-masing dan berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan serta kreativitas dalam berbagai bidang.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan ini memberikan kesempatan kepada warga kalurahan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang ada. Peran lembaga sangat krusial dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kalurahan.

Diharapkan, lembaga masyarakat ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Lembaga masyarakat merupakan suatu entitas yang mengatur berbagai prosedur dan pedoman dalam menjalin hubungan antarindividu dalam konteks kehidupan sosial, dengan tujuan menciptakan keteraturan dalam hidup. Di Kalurahan Nglindur, terdapat beberapa lembaga masyarakat, antara lain: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), Program Kesejahteraan Kalurahan (PKK), Posyandu, Linmas, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Kelompok Tani, serta berbagai organisasi keagamaan dan kelompok UMKM. Setiap lembaga sosial di Kalurahan Nglindur berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat yang memiliki kemampuan dan kreativitas sesuai dengan bidang masing-masing. Keberadaan lembaga sosial di desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Peran lembaga desa sangat krusial dalam mendukung keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya lembaga sosial, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal sesuai dengan fungsi dan bidang yang dimiliki.

Penelitian ini berfokus pada lembaga organisasi yang beroperasi di sektor ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan penting dalam perekonomian masyarakat di desa, di mana keberadaannya dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal serta mendukung kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Nglindur.

4. Gambaran Umum Usaha Mikro Kecil Menengah

Dalam rangka implementasi kebijakan Otonomi Daerah, pembinaan terhadap kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kalurahan Nglindur dalam menggerakkan usaha-usaha ke arah tercapainya sasaran pembangunan ekonomi yang berupa penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Nglindur. Masyarakat di Kalurahan Nglindur sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah, hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional, infrastruktur dan akses pemerintahan masih terbatas. Sehingga melalui program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang efektif, yang dapat memudahkan masyarakat untuk siap bersaing dalam pasar global. Dengan meningkatkan kualitas produk-produk lokal akan menambah nilai jual UMKM masyarakat Kalurahan Nglindur, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk lain atau asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di wilayah Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Penguasaan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Strategi yang perlu dilakukan dalam peningkatan akses teknologi bagi pengembangan UMKM adalah memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan, pengembangan pusat inovasi desain terhadap produk-produk UMKM yang sesuai dengan

kebutuhan pasar serta pengembangan pusat penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul saat ini telah menunjukkan aktivitas yang meningkat dengan terbentuknya kelompok-kelompok dari delapan padukuhan yang ada di wilayah tersebut. Meskipun demikian, mereka masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya peningkatan dalam hasil produksi dan kesulitan dalam proses pemasaran, di mana mereka kesulitan menemukan peluang untuk menjual produk-produk UMKM. Selain itu, belum ada dukungan dalam bentuk pemasaran, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah desa saat ini tengah berupaya untuk memproses aspek terkait PIRT dan Label Halal. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan audiensi dengan Dinas Koperasi UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Dari delapan kelompok UMKM yang ada, hanya satu kelompok yang telah memperoleh kedua label tersebut, yaitu kelompok yang memproduksi minuman instan jahe empit. Selain itu, pemerintah desa telah menjalin kerjasama dalam memberikan kebijakan atau program pemberdayaan, yang didukung oleh bantuan dana melalui program Forum Keserasian Sosial (FKS) dari Kementerian Sosial. Bantuan ini ditujukan untuk pengadaan sarana fisik pemberdayaan serta alat-alat produksi UMKM.

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai ragam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak

maupun pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realitasnya masih belum berjalan optimal. Untuk itu pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur. Adapun data kelompok-kelompok UMKM yang ada di Kalurahan Nglindur sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Data Kelompok UMKM

No	Nama Padukuhan	Nama Kelompok	Jenis-Jenis Produk	Jumlah Anggota
1	Nglindur Wetan	UPPKA Dawis04	Olahan Minuman Instan Jahe empirik	17 Orang
2	Ngepoh	Lestari Budaya	Stick Pisang	10 Orang
3	Nglindur Kulon	Sami Roasa	Jenang	8 Orang
4	Sumur	Maju Berkah	Enting-Enting Jahe	5 Orang
5	Gangslan Kidul	Guyub	Krecek Telo	10 orang
6	Gangsalan Lor	Sari Rejeki	Wingko Babat	7 Orang
7	Wuni	Mekar Snack	Keripik Talas	37 Orang
8	Tekik	Srikandi Snack	Kacang Oven	

Sumber: Data Observasi Tahun 2023

BAB III
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
***GOVERNING* PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN**
UMKM DI KALURAHAN NGLINDUR

Dalam bab ini dikemukakan tentang pengembangan UMKM di kalurahan Nglindur. Berdasarkan rangkuman penelitian yang telah diperoleh di lapangan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan untuk mengetahui tentang permasalahan yang menjadi topik peneliti dan pembahasan temuan peneliti. Data-data yang dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pemilihan informan ditujukan pada Lurah Kalurahan Nglindur serta masyarakat pelaku UMKM yang dianggap mengetahui objek penelitian agar dapat memberikan informasi data yang diperlukan. Tujuan peneliti untuk mengetahui strategi Pemerintah, komitmen Pemerintah dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur.

A. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan dalam Memajukan UMKM.

Strategi kepemimpinan adalah bentuk dari sebuah cara seorang yang memimpin Desa. Proses dalam menentukan sasaran dalam kegiatan lingkungan pedesaan, yang dipengaruhi oleh kepribadian atau sosok dari seorang kepala Desa. Mampu menggerakkan seluruh unsur perangkat Desa, masyarakat Desa, dan pihak-pihak yang terkait baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintahan pusat. Tujuan peneliti, untuk mengetahui bentuk pendekatan Pemerintahan Desa dalam strategi pengembangan UMKM di kalurahan nglindur. Berikut adalah

pernyataan Lurah Nglindur Bapak Muhammad Hanan Amshori, S.IP dalam wawancara bersama penulis pada tanggal 25 Juni 2024:

“Untuk kami dalam struktur organisasi pemerintah Kalurahan Nglindur itu ada kepala seksi yang punya tupoksi kaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu kepala seksi kesejahteraan rakyat, atau sekarang sesuai dengan nomenklatur undang-undang keistimewaan itu namanya kamituwo. Itu yang menangani kaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang didalamnya ada program UMKM. Dan untuk meningkatkan kompetensi kerja, tentu kami juga ada pelatihan peningkatan aparatur pemerintah desa atau kalurahan kemudian juga dari kelompok UMKM itu sendiri tentu ada wadah yang dibentuk berupa paguyuban UMKM juga ada pelatihan tersendiri yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan juga dari dinas terkait baik itu dari dinas perindustrian, koperasi di tingkat kabupaten dan juga dinas yang terkait di provinsi daerah istimewa yogyakarta. Dan itu anggarannya dari dinas terkait tersebut, baik dari kabupaten maupun dari provinsi” (Wawancara, 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber diatas maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur, Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Nglindur adalah dengan membentuk tim kerja yang terstruktur berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program UMKM dengan berlandaskan pada undang-undang keistimewaan (kamituwo). Selain itu Pemerintahan Kalurahn Nglindur juga memberikan program pelatihan kepada aparatur Kalurahan Nglindur untuk meningkatkan kompetensi kerja sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja aparatur Kelurahan Nglindur dalam rangka memaksimalkan pencapaian kerja dapat mendekati target kerja sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintahan Kalurahan Nglindur.

Dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat sebagai pelaku UMKM di Kalurahan Nglindur, pemerintah Kalurahan juga memberikan pelatihan-pelatihan

kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM serta pembentukan kelompok UMKM berdasarkan kategori-kategori usaha yang ditentukan guna meningkatkan mutu produktivitas dan menambah wawasan dan ketrampilan masyarakat sebagai pelaku UMKM di Kalurahan Nglindur

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Lastri selaku Ketua Kelompok UMKM Srikandi Snack (Kacang Oven):

“Pemerintah Kalurahan selalu terlibat dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kelompok UMKM, dan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok UMKM seperti alat produksi dan lain sebagainya” (Wawancara, 21 Juli 2024).

Berdasarkan pernyataan Ketua Kelompok UMKM Srikandi Snack (Kacang Oven) diatas bahwasannya Pemerintahan Kalurahan Nglindur selalu melibatkan diri dalam pemecahan masalah terkait kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Nglindur dalam rangka percepatan pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur.

Hal yang senanada juga disampaikan oleh Ibu Nur Widyastuti selaku Anggota UMKM Srikandi Snack (Kacang Oven):

“Pemerintah Kalurahan selalu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat selaku pengelola UMKM” (Wawancara, 22 Juli 2024).

Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Aribowo selaku Bendahara UMKM Kalurahan Nglindur dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Bentuk pendekatan Pemerintah Kalurahan adalah dengan membentuk kelompok UMKM tingkat Kalurahan dan mengadakan koordinasi rutin

setiap bulan untuk mendorong pengembangan UMKM” (Wawancara, 21 Juli 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasannya pendekatan pemerintah Kalurahan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat UMKM merupakan strategi pemerintah Kalurahan Nglindur dalam mendorong percepatan pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur agar semaksimal mungkin dapat mencapai target kerja sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat Kalurahan Nglindur. Upaya pemerintah Kalurahan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat UMKM di Kalurahn Nglindur adalah dengan memberikan pelatihan terhadap pelaku kelompok UMKM di Kalurahan Nglindur dan menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan oleh kelompok UMKM berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Strategi juga dapat diartikan sebagai perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat dikatakan sangat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya Menurut (Marrus 2016) mengartikan bahwa strategi pemerintah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus untuk mencapai suatu tujuan.

Berikut pernyataan Bapak Muhammat Hanan Amshori, S.IP dalam wawancaranya bersama penulis pada tanggal 25 Juni 2024

“Untuk program kegiatan memang selalu tidak lepas dari rencana awal tentu kegiatan yang sudah kita eksekusi khususnya kaitan dengan tim kerja yang menangani UMKM itu tentu tidak sesuai dengan perencanaan jadi memang secara umum seperti itu. Jadi perencanaan

itu tidak selalu sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Kita juga bersikap tetap harus memotivasi karena itu memang UMKM ini sebagai program prioritas dari kami selaku pemerintah kalurahan, jadi kami tetap berupaya memotivasi mereka. Dan secara umum dari program kegiatan yang ada itu dari tahun ke tahun tetap kita dorong tidak kita lepas artinya ketika sudah membuat program kegiatan itu harus berlanjut jangan sampai mandek sebagai cukup program kegiatan yang ada terus tahun berikutnya ganti program yang baru lagi tapi tidak berkelanjutan”.

Berikut pernyataan dari Bapak Proto selaku Anggota BPD Kalurahan Nglindur:

“Selaku BPD kami selalu memonitoring semua program dari pemerintah Kalurahan, dalam hal ini program UMKM untuk terus mengembangkan produk-produknya terutama dalam hal pemasaran”(Wawancara, 21 Juli 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Totok selaku Danarta Kalurahan Nglindur:

“Dalam pengembangan UMKM itu dibentuk tim untuk memonitoring, evaluasi setiap bulan juga pada kelompok-kelompok UMKM agar tidak berhenti karena UMKM yang sudah berjalan agar kedepannya bisa lebih baik lagi di segala bidang yang berkaitan dengan UMKM”(Wawancara, 22 Juli 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Husni Al Huda selaku Kamituwo Kalurahan Nglindur:

“Dari Pemerintah Kalurahan kita selalu mengunjungi di setiap kelompok UMKM yang berada di tiap-tiap padukuhan. Kemudian kita memberikan arahan kepada mereka dan mensupport mereka agar UMKM tetap eksis”(Wawancara, 22 Juli 2024).

Adapun pernyataan dari Ibu Rina Nur Hasanah, S.Pd selaku Carik Kalurahan Nglindur:

“Kalau untuk evaluasi secara formalitas itu kita belum ada tapi kita hanya sebatas kunjungan kemudian saat bazar atau ekspo dispo itu kita berikan masukan itu secara lisan saja”(Wawancara, 22 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber diatas maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam rangka mendorong percepatan pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur antara lain:

1. Pengembangan sumber daya manusia

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam pengembangan sumber daya manusia adalah dengan menyediakan pelatihan-pelatihan baik kepada aparatur kelurahan sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan UMKM di Kalurahan Nglindur dan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di Kalurahan Nglindur sebagai pelaku UMKM untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat Kalurahan Nglindur.

2. Fasilitas dan pemodalan

Selain mengembangkan sumber daya manusia, Pemerintah Kalurahan Nglindur juga memberikan dukungan fasilitas-fasilitas usaha serta modal usaha bagi masyarakat UMKM di Kalurahan Nglindur. Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta ikut mendorong percepatan pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur.

3. Evaluasi dan pengawasan

Strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam mendorong pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur adalah dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas yang diberikan dengan tepat dan benar, serta melakukan pendekatan dan evaluasi bersama masyarakat UMKM di Kalurahan Nglindur untuk membantu mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur.

Meskipun dengan mengedepankan efisiensi kerja, Pemerintahan Desa di Kalurahan Nglindur tidak memungkiri bahwa dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, ada kemungkinan hasil kerja dari tim yang akan diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun selaku Pemerintahan di Kalurahan Nglindur, meski dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang dihadapi dalam program pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur tetap berupaya dengan membangun komunikasi yang baik dan persuasif bersama anggota UMKM dalam menjaga eksetensi dan mendorong pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur agar tetap eksis dan berkelanjutan.

B. Komitmen Pemerintah Kalurahan dalam Memberikan Dukungan Terhadap Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur

Komitmen dimaksud berupa dukungan anggaran untuk program pemberdayaan dan berkelanjutan umkm. Apabila dalam pemerintah kalurahan nglindur tidak memiliki komitmen dapat menyebabkan ketidakpercayaan

masyarakat dan juga dapat menyebabkan sebuah program umkm itu tidak berjalan atau berkembang. Berikut pernyataan dari Bapak Muhammad Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur dalam wawancara bersama penulis pada tanggal 25 Juni 2024:

Sebagai seorang Lurah harus mempunyai komitmen untuk membangun apa yang telah direncanakan. Membangun fasilitas umum dan perekonomian di desa merupakan bagian dari prioritas utama oleh karena itu amanah yang diberikan oleh masyarakat tidak boleh di sia-siakan. Sehingga dalam pengembangan UMKM itu harus memiliki komitmen. Berikut pernyataan dari Bapak Muhammad Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur:

“Komitmen kami selaku pemerintah Kalurahan dan saya sendiri sebagai lurah tentu kita punya komitmen bahwa UMKM itu harus ada dan berdaya dan berkelanjutan. Di dua tahun pertama kita juga mengintervensi kaitan pendanaan dan juga pelatihan kemudian di tahun ketiga kita juga masih memberdayakan kaitan dengan kegiatan yang ada di UMKM. Jadi komitmen kami memang tidak hanya di tahun ke 2 dari 6 tahun menjalankan pemerintahan dalam satu periode ini jadi tahun ke 3 juga kita masih intervensi masih kita dorong UMKM itu bagaimana bisa berlanjut dan tetap eksis” (Wawancara, 25 Juni 2024).

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Lastri selaku Ketua Kelompok UMKM Srikandi Snack:

“Pemerintah Kalurahan memberikan tempat untuk pemasaran bagi kelompok UMKM di *rest area* supaya kelompok UMKM lebih maju dan berkembang” (Wawancara, 21 Juli 2024)

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Nur Widyastuti selaku anggota UMKM Srikandi Snack:

“Pemerintah memfasilitasi peralatan atau kelengkapan UMKM, serta memberikan tempat pemasaran bagi kelompok UMKM” (Wawancara, 22 Juli 2024).

Adapun pernyataan dari Bapak Aribowo selaku bendahara UMKM Kalurahan Nglindur

“Bentuk dukungan Pemerintah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk pelatihan” (Wawancara, 21 Juli 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur, Pemerintah Kalurahan Nglindur mempunyai komitmen yang kuat bahwa dengan terciptanya UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur merupakan suatu hal yang teramat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah Desa.

Dalam program pengembangan UMKM tentu adanya komitmen atau dukungan dari pemerintah kalurahan untuk mendorong pengembangan UMKM yang ada. Peneliti juga ingin mengetahui bahwasannya apakah Pemerintahan Desa memberikan perhatian yang khusus dalam hal pendanaan dan pelatihan dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM diwilayah Kalurahan Nglindur. Berikut pernyataan dari Bapak Muhammat Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur:

“Harapan kita selaku pemerintah kalurahan dengan adanya UMKM ini tentu menjadi tanggung jawab semuanya bukan hanya pemerintah kalurahan tetapi lembaga yang ada kemudian warga masyarakat karena dengan adanya UMKM ini sedikit meningkatkan *in come* bagi keluarga karena kebanyakan UMKM itu kan ibu-ibu rumah tangga yang dimana mata pencaharian warga masyarakat kami petani karena ada satu waktu yang tidak bisa bekerja karena menunggu masa panen

dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab kita selaku pemerintah kaluraha” (Wawancara, 25 Juni 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa dengan upaya membangun kemitraan bersama lembaga lainnya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam mendorong pengembangan UMKM baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

. Berikut pernyataan dari Bapak Muhammat Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur dalam wawancara bersama penulis pada tanggal 25 Juni 2024:

“Tentu dalam pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan UMKM itu kita tidak lepas dari yang namanya tidak lanjut. Artinya ketika kita membuat program kegiatan dan itu sudah dikatakan oke, program kegiatan UMKM itu dari 8 padukuhan ada 8 kelompok UMKM kita bentuk kemudian kita fasilitasi dengan pendanaan, pelatihan, dan juga peralatan yang dibutuhkan tentu itu tidak berhenti sampai disitu dan disitulah tentu kita harus bagaimana kelompok-kelompok UMKM itu bisa berjalan dan tetap kita pantau setelah berjalan seperti apa perjalanan mereka kaitan dengan fasilitas yang sudah kita berikan jadi itu kita evaluasi, kenapa kelompok jahe instan misalnya yang memproduksi minuman instan dari bahan baku jahe itu bisa eksis bisa produksi paling tidak setiap hari terus pemasarannya juga lancar tetapi disini lain di kelompok yang memproduksi kerupuk ketela tidak bisa jalan seperti kelompok jahe instan. Tentu kita ada pendekatan untuk memotivasi juga kaitan di wadah UMKM itu dan memotivasi kelompok-kelompok yang sudah terbentuk (Wawancara, 25 Juni 2024).

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Lastry selaku Ketua Kelompok UMKM Srikandi Snack :

“Kita kelompok UMKM itu setiap bulannya diadakan pertemuan dan diberikan motivasi supaya kelompok UMKM kedepannya lebih bagus” (Wawancara, 21 Juli 2024).

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Nur Widyastuti selaku anggota UMKM Srikandi Snack:

“Kurang lebih satu bulan sekali, Pemerintah Kalurahan mengadakan pertemuan untuk setiap pelaku UMKM dan diberikan arahan supaya UMKM lebih maju dan berkembang” (Wawancara, 22 Juli 2024).

Dan pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Aribowo selaku bendahara UMKM Kalurahan Nglindur:

“Pemerintah Kalurahan selalu mengadakan pertemuan setiap bulan untuk monitoring jalanya UMKM serta mengecek administrasi dan keuangan” (Wawancara, 21 Juli 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan Pemerintahan Desa di Kalurahn Nglindur selalu berupaya dengan berbagai pendekatan dalam melakukan evaluasi dan terus mendorong pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur. Pemerintah Desa di Kalurahan Nglindur juga selain memotivasi masyarakat sebagai pelaku UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang, Pemerintah Desa juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas dan pendanaan dan merumuskan bentuk pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka mensukseskan program kerja UMKM di Kalurahn Nglindur.

Dalam pengembangan kelompok UMKM sama halnya seperti pengembangan ekonomi masyarakat. Diperlukan evaluasi serta peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemerintah Kalurahan berkewajiban dalam memajukan wilayahnya serta mensejahterakan masyarakat dengan mengoptimalkan segala potensi dan kearifan lokal yang dimiliki terutama UMKM yang sudah ada. Berikut pernyataan dari Bapak Proto selaku Anggota BPD Kalurahan Nglindur:

“Kami selaku BPD mengapresiasi kelompok UMKM yang selalu terlihat di setiap acara atau bazar UMKM semoga bisa meningkatkan perekonomian. Dan juga mengapresiasi pemerintah Kalurahan yang

selalu melibatkan kelompok UMKM di setiap kegiatan”(Wawancara, 21 Juli 2024).

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Totok selaku Danarta Kalurahan Nglindur:

“Bentuk apresiasi dari pemerintahan Kalurahan Nglindur dalam hal ini dan juga pihak itu awalnya mendukung dan saat ini dari pemerintah Kalurahan ada memberikan tambahan modal, pelatihan dan sebagainya, untuk mengapresiasi para pelaku UMKM yang telah berjalan dan juga diadakannya setiap event-event, baik hari jadi Kalurahan maupun HUT RI, hari jadi Kapanewon dilibatkan sebagai bentuk apresiasi agar kelompok UMKM ini bersemangat dan berinovasi di produknya juga lebih menambah pengalaman agar nanti bisa bermanfaat lebih banyak bagi perekonomian masyarakat”(Wawancara, 22 Juli 2024).

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Rina Nur Hasanah, S.Pd selaku Carik

Kalurahan Nglindur:

“Sebagai bentuk apresiasi kita memberikan fasilitas seperti di rest area itu kita menyediakan satu lapak khusus untuk UMKM yang ada di wilayah Kalurahan Nglindur untuk mereka memasarkan produk-produk mereka”(Wawancara, 22 Juli 2024).

Berikut pernyataan dari Bapak Muhammad Husni Al Huda selaku

Kamituwo Kalurahan Nglindur:

“Untuk apresiasi kita dari Kalurahan selalu mengapresiasi mereka seperti ada event-event atau hari jadi Kalurahan maupun Kapanewon itu kita selalu melibatkan kelompok UMKM untuk memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Kalurahan Nglindur agar mereka tetap semangat”(Wawancara, 22 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Kelurahan Nglindur selalu melakukan pengawasan secara berkala terhadap jalannya UMKM yang ada di Kelurahan Nglindur. Selain itu

Pemerintah Desa juga memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat UMKM di kelurahan Nglindur sebagai bentuk perhormatan Pemerintahan Desa dengan hasil kerja dan pencapaian masyarakat UMKM dalam priode tertentu.

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintahan Kalurahan Nglindur selalu mengikut, memperhatikan dan melakukan evaluasi terhadap pengembangan UMKM di Kelurahan Nglindur untuk mewujudkan pencapaian kerja dalam peran Pemerintahan Desa pada Program UMKM. Selain itu bentuk pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Desa menunjukan bahwa dalam mewujudkan perubahan positif terhadap kemajuan pengembangan UMKM di kelurahan Nglindur, Pemerintah Desa melakukan pendekatan dengan bentuk komunikasi yang persuasif dan membangun hubungan yang sangat ramah dengan masyarakat sebagai pelaku UMKM di kelurahan Nglindur.

Dalam program pengembangan UMKM di kalurahan Nglindur ditunjukan melalui pendekatan Pemerintah Desa dalam memotivasi masyarakat sebagai pelaku penggerak UMKM di Kalurahan Nglindur dengan pengadaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan serta pelatihan-pelatihan yang diberikan baik kepada tim kerja yang dibentuk maupun kepada masyarakat. Sebagaimana kutipan pernyataan Bapak Muhammad Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur dalam wawancara bersama peulis pada tangaal 25 Juni 2024, yang mengatakan bahwa:

“UMKM kita bentuk kemudian kita fasilitasi dengan pendanaan, pelatihan, dan juga peralatan yang dibutuhkan tentu itu tidak berhenti sampai disitu dan disitulah tentu kita harus bagaimana kelompok-kelompok UMKM itu bisa berjalan dan tetap kita pantau setelah berjalan seperti apa perjalanan mereka kaitan dengan fasilitas yang sudah kita berikan jadi itu kita evaluasi”.

Dan selanjutnya kutipan pernyataan Bapak Muhammat Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur dalam wawancara bersama penulis pada tanggal 25 Juni 2024, yang mengatakan bahwa:

“Dan secara umum dari program kegiatan yang ada itu dari tahun ke tahun tetap kita dorong tidak kita lepas artinya ketika sudah membuat program kegiatan itu harus berlanjut jangan sampai mandek sebagai cukup program kegiatan yang ada terus tahun berikutnya ganti program yang baru lagi tapi tidak berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa berkomitmen dalam mendorong pengembangan dan menjaga eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur agar dapat berjalan berkelanjutan. Sehingga dengan mengutamakan efisiensi kerja, Pemerintahan Desa memberikan perhatian yang khusus dalam hal pendanaan dan pelatihan dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM diwilayah Kalurahan Nglindur.

Hal ini menunjukan komitmen dan salah satu strategi Pemerintahan Kalurahan Nglindur dalam merespon sinergitas pelaksanaan program pengembangan UMKM. Selain itu strategi pemerintah dalam membangun komunikasi yang persuasif bersama masyarakat UMKM juga merupakan sebuah upaya Pemerintah dalam mengatasi faktor-fakto yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program UMKM di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa berkomitmen dalam mendorong pengembangan dan menjaga eksistensi UMKM di Kalurahan Nglindur agar dapat berjalan berkelanjutan. Sehingga dengan mengutamakan efisiensi kerja, Pemerintahan Desa memberikan perhatian

yang khusus dalam hal pendanaan dan pelatihan dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dan narasumber yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulannya bahwa dengan upaya pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap pendanaan dan pelatihan bagi masyarakat UMKM, keterlibatan pemerintah dalam menyediakan ruang serta membangun kemitraan bersama bagi masyarakat UMKM untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Wilayah Kalurahan Nglindur merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam mendorong pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur

1. Faktor pendukung

Faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan UMKM merupakan elemen-elemen yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, memenuhi tujuan yang ditetapkan, dan meningkatkan kualitas usaha dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. (Hariyoko & Soesiantoro, 2021).

Berdasarkan hasil observasi penulis di Kalurahan Nglindur menemukan beberapa faktor yang menjadi pendukung perkembangan UMKM di Kalurahan Nglindur antara lain:

a. Peluang

Berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh penulis ditemukan bahwa produk UMKM-UMKM yang ada di Kalurahan Nglindur seperti *stick* pisang, Minuman Instan Jahe dan enting-enting jahe masih memiliki peluang dikarenakan produk-produk tersebut masih belum banyak ditemukan di wilayah Provinsi DKI Yogyakarta. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor pendukung bagi pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur.

b. Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai

Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia di wilayah Kalurahan Nglindur sangat memadai seperti hasil pertanian berupa umbi-umbian dan rempa-rempa yang dapat diolah menjadi suatu produk makanan dan minuman bagi UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur. Dengan keadaan Sumber Daya Alam (SDA) ini tentunya menjadi salah satu faktor pendukung bagi UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur untuk berinovasi dalam menciptakan produk-produk makanan dan minuman baik di wilayah Yogyakarta maupun ditingkat nasional dan internasional.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Muhammad Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur yang mengatakan:

“Komitmen kami selaku pemerintah Kalurahan dan saya sendiri sebagai lurah tentu kita punya komitmen bahwa UMKM itu harus ada dan berdaya dan berkelanjutan. Di dua tahun pertama kita juga mengintervensi kaitan pendanaan dan juga pelatihan kemudian di tahun ketiga kita juga masih memberdayakan kaitan dengan kegiatan yang ada di UMKM.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa salah satu faktor pendukung pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur adalah dukungan Pemerintahan Kalurahan berupa Bantuan modal dari pemerintah. Pernyataan ini jelas memberikan dukungan yang signifikan bagi para pelaku UMKM dalam upaya mereka untuk mengembangkan usaha dengan lebih efisien.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Muhammad Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur dan hal yang senada disampaikan oleh Ibu Nur Widyastuti selaku anggota UMKM Srikandi Snack yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Kalurahan selalu melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat selaku pengelola UMKM.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa Pemerintah Kalurahan selalu memberikan perhatian dan pendekatan kepada masyarakat UMKM, sehingga Pemerintah Kalurahan selalu memberikan Sosialisasi UMKM kepada masyarakat di wilayah Kalurahan Nglindur. Maka dari itu sosialisasi UMKM merupakan salah satu faktor pendukung bagi pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur, dikarenakan sosialisasi UMKM yang dilakukan dapat menambah wawasan bagi pelaku UMKM dan berdampak bagi kreatifitas dan inovasi masyarakat UMKM dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung pengembangan UMKM di Wilayah Kalurahan Nglindur antara lain:

1. Peluang
2. Sumber Daya Alam (SDA)
3. Bantuan Modal Pemerintah
4. Sosialisasi UMKM

2 Faktor penghambat

Faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan UMKM merupakan elemen-elemen yang menyebabkan terjadinya kendala dalam perkembangan UMKM, sehingga hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, faktor penghambat ini perlu segera diidentifikasi dan ditangani oleh manajemen UMKM agar proses pertumbuhan dapat berlangsung dengan lebih baik dan meningkatkan nilai yang akan dicapai di masa depan.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam menjalankan program kerja pengembangan UMKM di kalurahan Nglindur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Muhammat Hanan Amshori, S.IP selaku Lurah Nglindur dalam wawancara bersama penulis pada tanggal 25 Juni 2024, yang mengatakan bahwa:

“Jadi selama ini UMKM yang sudah ada itu tentu mereka banyak kendala permodalan, pelatihan, alat produksi dan juga pemasaran itu kan macam – macam indikator yang menyebabkan konflik antara satu kelompok UMKM dengan kelompok UMKM yang lain. Itu strategi kami selaku pemerintah Kalurahan untuk mengatasi, yang artinya pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok UMKM tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, masih terdapat banyak faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan program pengembangan UMKM di kalurahan Nglindur, antara lain:

1. Masyarakat di Kalurahan Nglindur masih kekurangan modal usaha

Masyarakat di Kalurahan Nglindur masih kekurangan modal usaha dalam mendirikan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur, hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan dukungan pendanaan dari Pemerintah.

2. Masyarakat di Kalurahan Nglindur masih kekurangan ketrampilan

Masyarakat masih kekurangan ketrampilan dalam menjalankan dan mengembangkan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur, hal ini menunjukan bahwa masyarakat di wilayah Kalurahan Nglindur masih sangat membutuhkan berbagai bentuk pelatihan untuk menambah ketrampilan masyarakat.

3. Masyarakat di Kalurahan Nglindur masih kekurangan peralatan

Masyarakat di Kalurahan Nglindur masih kekurangan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur, hal ini menunjukan bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan kontribusi Pemerintah dalam penyediaan peralatan-peralatan penunjang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur

4. Terjadi konflik antar kelompok UMKM

Konflik antar kelompok UMKM masih terjadi dikarenakan oleh persoalan sosial yang ada di masyarakat Kalurahan Nglindur saat ini.

5. Kesulitan pemasaran juga termasuk kunci suksesnya perkembangan UMKM, namun dapat kita lihat banyak sekali UMKM yang memproduksi barang yang sama dengan kualitas yang hampir sama pula. Persaingan di dunia usaha terlebih lagi UMKM sangat ketat, sehingga sulitnya pelaku UMKM untuk memasarkan produk yang diproduksi. Hal ini juga merupakan dampak dari penguasaan internet yang tidak matang tadi. Dimana seharusnya dengan penguasaan internet pemasaran produk dapat lebih mudah walaupun persaingan juga sangat ketat.

6. Izin usaha merupakan bentuk pemantapan atas segala yang berhubungan dengan pendirian usaha tak terkecuali untuk UMKM. Izin usaha dapat pula berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bahkan sampai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perizinan usaha ini juga suatu bentuk bukti bahwa UMKM tersebut legal dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada di Indonesia. Dengan perizinan usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM tentunya dapat mempermudah agar para masyarakat percaya atas produk yang dihasilkan dan perkembangan UMKM dapat berjalan dengan semestinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam mendorong pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur adalah dengan membentuk tim kerja yang terstruktur berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program UMKM dengan berlandaskan pada undang-undang keistimewaan (kamituwo), memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM serta pembentukan kelompok UMKM berdasarkan kategori-kategori usaha yang ditentukan guna meningkatkan mutu produktivitas dan menambah wawasan dan ketrampilan masyarakat sebagai pelaku UMKM di Kalurahan Nglindur.
2. Komitmen Pemerintah Kalurahan Nglindur dalam mendorong pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur Pemerintah Kalurahan memberikan perhatian yang khusus dalam hal pendanaan dan pelatihan dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur. Selain memberikan pendanaan dan pelatihan kepada masyarakat sebagai pelaku UMKM Pemerintah Kalurahan Nglindur juga melakukan evaluasi terhadap penggunaan fasilitas dan pendanaan dan merumuskan bentuk pelatihan yang

dibutuhkan dalam rangka mensukseskan program kerja UMKM di Kalurahan Nglindur.

3. Faktor-faktor pendukung pengembangan UMKM di Wilayah Kalurahan Nglindur antara lain: 1). Peluang, 2). Sumber Daya Alam (SDA), 3). Bantuan Modal Pemerintah, 4). Sosialisasi UMKM. Selain itu terdapat juga Fakto-faktor yang menjadi kendala dalam program pengembangan UMKM di wilayah Kalurahan Nglindur antara lain: 1) Masyarakat di Kalurahan Nglindur masih kekurangan modal usaha; 2) Masyarakat di Kalurahan Nglindur masih kekurangan ketrampilan; 3) Masyarakat di Kalurahan Nglindur masih kekurangan peralatan; 4) Terjadi konflik antar kelompok UMKM.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk memberikan rekomendasi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan kepada Pemerintah Desa Nglindur. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya dan dengan menarik kesimpulan dari temuan yang ada, peneliti menyampaikan beberapa saran, yang terdiri dari hal-hal berikut:

1. Untuk Pemerintah Kalurahan Nglindur

a. Penyediaan Akses Modal

Pemerintah Kalurahan Nglindur sebaiknya mengembangkan program bantuan modal bagi pelaku UMKM setempat. Program ini dirancang untuk mempermudah para pengusaha dalam memperoleh modal yang diperlukan untuk usaha mereka.

b. Pelatihan dan Pengembangan Keahlian

Pemerintah Kalurahan Nglindur mengadakan pelatihan dan kursus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM. Pelatihan ini meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk, sehingga para pelaku UMKM dapat mengoptimalkan usaha mereka.

c. Pemasaran dan Promosi

Pemerintah Kalurahan Nglindur bekerja sama dengan instansi terkait dalam mempromosikan produk-produk UMKM di Kalurahan Nglindur. Program-program pemasaran dan promosi yang dilakukan mencakup partisipasi dalam pameran, pembuatan katalog produk, serta penggunaan media sosial untuk memasarkan produk-produk UMKM Kalurahan Nglindur.

2. Bagi Masyarakat Pelaku UMKM

a. Diharapkan para pelaku UMKM dapat menerima perubahan teknologi informasi yang begitu cepat dengan tujuan untuk mudah mendapatkan akses informasi bisnis yang berguna bagi usahanya.

b. Pada dasarnya manusia adalah jiwa yang selalu berinovasi untuk itu pembinaan pembinaan pelaku umkm yang dapat dikembangkan berupa pelatihan dan pendampingan khusus bagi usahanya.

c. Bagi UMKM, usaha yang dijalankan berbekal dengan modal sendiri atau asupan dari pihak luar sekiranya dapat difokuskan untuk pengembangan usaha terutama produk dan perspektif lain seperti pembiayaan, pemasaran, kemitraan dan wawasan akan perkembangan pasar sehingga dapat berkembang dan tetap eksis.

DAFTAR PUSTAKA

- Nirwana, A. (2019). Pengaruh Jenjang Pendidikan, Skala Usaha dan Lama Usaha Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Ciawigebang. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*.
- Alamsah, N. (2019). *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press.
- Aliyah, A. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Andarista, M. (2021). Pengaruh persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah tentang akuntansi, pengetahuan akuntansi, dan skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi: studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Faradina. (2016). Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Rumah Cantik Alamanda. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*.
- Ismail, Y. (2019). *Metodologi Penelitian sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Kreitner. (2014). *Perilaku Organisas*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Salam, M. D. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Sutrisno, E. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak Ke Enam*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Zachrawan, F. D. (2022). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan UMKM Wisata Panci di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kegiatan Wawancara



Wawancara peneliti dengan Ibu Lastri selaku Anggota UMKM Kalurahan

Nglingdur (hari/tanggal Sabtu 20 Juli 2024)



Wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad selaku Kamituwo Kalurahan

Nglingdur (hari/tanggal Senin 22 Juli 2024)



Wawancara peneliti dengan Bapak Hanan Amshori selaku Lurah Kalurahan
Nglindur (hari/tanggal Selasa 25 Juni 2024)



Wawancara peneliti dengan Ibu Rina selaku Carik Kalurahan Nglindur
(hari/tanggal Senin 22 Juli 2024)



Wawancara peneliti dengan Bapak Aribowo selaku Bendahara UMKM Kalurahan
Nglindur (hari/tanggal Sabtu 20 Juli 2024)



Wawancara peneliti dengan Bapak Proto selaku Anggota BPD Kalurahan
Nglindur (hari/tanggal Sabtu 20 Juli 2024)



Wawancara peneliti dengan Bapak Totok selaku Danarto Kalurahan Nglindur
(hari/tanggal Senin 22 Juli 2024)



Wawancara peneliti dengan Ibu Nur selaku Anggota UMKM Kalurahan Nglindur
(hari/tanggal Senin 22 Juli 2024)

Lmpiran 2: Daftar Pertanyaan Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Pemerintah Kalurahan

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk motivasi stakeholder dalam memotivasi tim kerja mencapai kesuksesan
2. Bagaimana bentuk evaluasi stakeholder dan tim kerja dalam program pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur
3. Apa bentuk apresiasi stakeholder terhadap pencapaian kerja oleh tim kerja dalam program pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Masyarakat

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk keterlibatan pemerintah Kalurahan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada kelompok UMKM atau antar kelompok UMKM di Kalurahan Nglindur?
2. Bagaimana bentuk pendekatan pemerintah Kalurahan dalam membantu masyarakat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur?
3. Bagaimana bentuk dukungan pemerintah Kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur?
4. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan terhadap jalannya UMKM di Kalurahan Nglindur?

DAFTAR PERTANYAAN

Untuk Lurah Nglindur

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Jabatan/Pekerjaan :

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa strategi bapak dalam menghadapi konflik yang terjadi pada pelaksanaan program Pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur?
2. Bagaimana bentuk pendekatan bapak sebagai Lurah dengan staf dalam memotivasi mereka untuk mensukseskan program UMKM di Kalurahan Nglindur?
3. Strategi apa yang digunakan bapak dalam meningkatkan kompetensi tim kerja dalam program pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur?
4. Bentuk evaluasi kerja seperti apa yang dilakukan dalam mendorong pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur?
5. Seperti apa komitmen bapak dalam membentuk tim kerja pada program pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur?
6. Bagaimana sikap bapak terhadap pencapaian kerja tim yang belum maksimal dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kalurahan Nglindur?

Lampiran 3: Photo Produk UMKM Kalurahan Nglindur



Produk Kacang Oven



Produk Minuman Instan Jahe Empirik